KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN
PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah bahwa Perencanaan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib pemerintah pusat dan daerah.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018. Sedangkan kabupaten/kota yang telah menyusun DDDTLH sampai dengan tahun 2018 sebanyak 17 (tujuh belas) kabupaten/kota dan 8 (delapan) kabupaten/kota dalam proses menyusun dokumen RPPLH.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan memenuhi target kinerja terkait dengan capaian strategi strategi (terwujudnya Penataan Lingkungan) dengan indikator kinerja: kecukupan instrument penataan lingkungan dan pemanfaatan instrument penataan lingkungan, maka perlu dilakukan pembinaan ke kabupaten/kota yang belum melakukan penyusunan DDDTLH dan RPPLH serta melakukan evaluasi sejauhmana pemanfaatan dokumen DDDTLH kedalam dokumen perencanaan lainnya dan melakukan sinergitas atas dokumen RPPLH provinsi dengan dokumen RPPLH kab/kota melalui kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini dimaksudkan agar tersusunya dokumen DDDTLH dan dokumen RPPLH kabupaten/kota dan dimanfaatkannya dokumen DDDTLH dan dokumen RPPLH tersebut dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

b. Tujuan

- Pembinaan dalam penyusunan DDDTLH dan RPPLH kabupaten/kota.
- Mengevaluasi sejauhmana pemanfaatan dokumen DDDTLH terhadap penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
- Melakukan sinergitas atas dokumen RPPLH provinsi dengan dokumen RPPLH kab/kota.

1.3. Lokasi Kegiatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dilakukan di 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Organisasi Pelaksana

Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Tim yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
DATA PERENCANAAN

2.1. Data Dasar

Data-data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat meliputi 2 (dua) kelompok data sebagai berikut:

a. Data primer berupa hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Data ini diperlukan untuk melihat sejauh mana respon dari aparat instansi/OPD terkait kabupaten/kota terhadap pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjukkan tingkat pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dalam pelaksanaan/implementasinya, serta kendala-kendala yang dihadapi pada saat dilakukannya pembinaan. Dengan dukungan data dimaksud, maka dapat direncanakan mekanisme/teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan yang lebih baik dan tepat sasaran. Adapun progres kabupaten/kota dalam penyusunan DDDTLH dan RPPLH sebagai berikut:
   - 10 (sepuluh) kab/kota telah melakukan penyusunan DDDTLH (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Solok, Kab. Solok Selatan) pada tahun 2017;
   - 7 (tujuh) kab/kota sedang melakukan penyusunan DDDTLH (Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab. Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kota Padang) pada tahun 2018;
   - 2 (dua) kabupaten belum melakukan penyusunan DDDTLH (Kab. Dharmasraya dan Kab. Kepulauan Mentawai) pada tahun 2018;
   - 4 (empat) kabupaten/kota melakukan penyusunan draft dokumen RPPLH pada tahun 2018 (Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Solok, dan Kab. Solok Selatan);
   - 2 (dua) kabupaten/kota melakukan penyusunan dokumen final pada tahun 2018 (Kota Padang Panjang dan Kab. Pasaman);
   - 10 kabupaten/kota merencanakan akan melakukan penyusunan dokumen RPPLH pada tahun 2019 (Kab. Sijunjung, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar, Kota Payakumbuh, dan Kab. Pesisir Selatan).

b. Data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari pihak atau instansi/OPD terkait kabupaten/kota pada saat kegiatan tahun sebelumnya atau pun melalui surat/koordinasi langsung dengan instansi/OPD terkait sebagaimana dimaksud.

2.2. Standar

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempedomani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain mempedomani Undang-Undang tersebut, penyusunan RPPLH juga berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang- Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. DPA OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP

3.1. Capaian Tujuan

Capaian pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dalam penyusunan DDDTLH dan RPPLH kabupaten/kota.
2. Mengevaluasi sejauhmana pemanfaatan dokumen DDDTLH terhadap penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
3. Melakukan sinergitas atas dokumen RPPLH provinsi dengan dokumen RPPLH kab/kota.

3.2. *Outcome dan Output* Kegiatan

1. *Outcome* dari kegiatan ini adalah disusunnya dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.
2. *Output* dari kegiatan ini adalah jumlah kabupaten/kota yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

3.3. Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, meliputi :

a. Tahap Persiapan

Tahapan ini meliputi beberapa kegiatan, seperti:

1) Penyiapan kelengkapan administrasi (persuratan) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan (termasuk dalam hal ini penyiapan PO/KAK kegiatan dan penyusunan SK Tim pembinaan dan evaluasi).
2) Rapat koordinasi Tim Pembinaan dalam rangka membahas persiapan dan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi
3) Penyiapan surat pemberitahuan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan kelengkapan administrasi lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan dan evaluasi penyusunan RPPLH Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ini meliputi :

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH dan RPPLH terhadap kabupaten/kota yang belum menganggarkan dan menyusun DDDTLH dan RPPLH.
2. Melakukan pembinaan dan sinergi antara dokumen RPPLH Provinsi dengan Kab/kota yang sedang proses penyusunan RPPLH.
3. Melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen DDDTLH berbasis jasa ekosistem yang telah disusun oleh kabupaten/kota kedalam dokumen perencanaan lainnya.
4. Melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota terkait hasil pelaksanaan kegiatan.
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi dapat juga dilakukan pada saat menjadi Narasumber melalui kegiatan sosialisasi/FGD terkait penyusunan DDDTLH maupun RPPLH yang dilakukan oleh kabupaten/kota.

c. Tahap Evaluasi

Meliputi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan serta menyampaikan surat follow up hasil pelaksanaan kegiatan ke kabupaten/kota terkait bila diperlukan.

3.4. Peralatan dan Material

Peralatan dan material pendukung yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan diantaranya meliputi kendaraan roda 4 (empat) sebagai media/sarana transportasi dari dan ke lokasi kegiatan, laptop/komputer dan *infocus* sebagai media/sarana untuk pembuatan/penyajian presentasi pada saat pembinaan, ATK, bahan-bahan presentasi, dokumen DDDTLH dan RPPLH provinsi dan kabupaten/kota terkait yang akan dipedomani, serta data-data terkait lainnya yang diperlukan.

3.5. Lingkup Kewenangan

Lingkup kewenangan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah wiiayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 12 sampai dengan 19

yang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya.

3.6. *Time Schedule*

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun (Januari – Desember 2019) dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan DPA, PO, SK dan kelengkapan administrasi lainnya).												
2. Rapat awal pelaksanaan kegiatan												
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi												
4. Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk rapat dan koordinasi ke KLHK terkait dengan pelaksanaan kegiatan												
5. Rapat koordinasi dengan kab/kota terkait hasil pelaksanaan kegiatan												
6. Penyusunan laporan akhir hasil kegiatan												

yang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya.

3.6. *Time Schedule*

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun (Januari – Desember 2019) dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan DPA, PO, SK dan kelengkapan administrasi lainnya).												
2. Rapat awal pelaksanaan kegiatan												
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi												
4. Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk rapat dan koordinasi ke KLHK terkait dengan pelaksanaan kegiatan												
5. Rapat koordinasi dengan kab/kota terkait hasil pelaksanaan kegiatan												
6. Penyusunan laporan akhir hasil kegiatan												

BAB IV
PRODUK

4.1 Jenis Laporan

Laporan dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 terdiri dari:

1. Laporan perjalanan dinas (per kegiatan) hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi ke kabupaten/kota, menghadiri/mengikuti kegiatan-kegiatan terkait DDDTLH/RPPLH di kabupaten/kota atau pun di Pusat, serta pelaksanaan konsultasi/koordinasi ke instansi terkait di tingkat Pusat.
2. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

4.2 Jumlah Laporan

Untuk setiap jenis laporan sebagaimana tersebut di atas, jumlah/volume yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan perjalanan dinas untuk kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat masing-masing 1 (satu) laporan untuk setiap tempat pelaksanaan kegiatan, untuk tahun 2019 ini ditargetkan akan dilakukan terhadap 7 (tujuh) kabupaten/kota.
2. Laporan tahunan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya adalah 1 (satu) laporan, dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.

4.3 Frekuensi Pelaporan

Terkait dengan frekuensi pelaporan, untuk masing-masing laporan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan perjalanan dinas dibuat setiap selesainya pelaksanaan kegiatan.
2. Laporan tahunan dibuat 1 (satu) kali setahun pada akhir kegiatan, yakni pada akhir tahun 2019.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Segaia biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 32.759.200,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus iima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA LANGSUNG	**32.759.200**
BELANJA BARANG DAN JASA	**32.759.200**
Belanja Bahan Pakai Habis	**6.396.000**
Belanja alat tulis kantor	*1.896.000*
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi	*4.500.000*
Belanja Cetak dan Penggandaan	**1.272.000**
Belanja Penggandaan	*1.272.000*
Belanja Makanan & Minuman	**2.080.000**
Belanja makanan & minuman rapat	*2.080.000*
Belanja Perjalanan Dinas	***23.011.200***
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	*23.011.200*

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Disetujui dan disahkan
Tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KABID TATA LINGKUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT	
Ir. SITI AISYAH, M.Si	**YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si**
Pembina Tk. I	Pembina
NIP. 19670928 199203 2 002	NIP. 19731129 199803 2 001

PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN RPPLH BERBASIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2019

A. DATA-DATA

Nama SKPD	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan	:	LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Lokasi Kegiatan	:	Sumatera Barat.
Nama Kegiatan	:	**Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat**
Pengguna Anggaran		
Nama	:	Ir. SiTI AISYAH, MSi
Jabatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Kuasa Pengguna Anggaran		
Nama	:	Yosmike Yusra, SE, M.Si
Jabatan	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
Nama	:	Desrizal, ST
Jabatan	:	Kasi Kajian Dampak Lingkungan
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Bendahara		
Nama	:	Handri
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran
Aiamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA	:	
Jumlah Dana	:	Rp. 32.759.200,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	:	**A. Maksud Kegiatan** Tersusunnya dokumen DDDTLH dan dokumen RPPLH kabupaten/kota dan dimanfaatkannya dokumen DDDTLH dan dokumen RPPLH dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya; **B. Tujuan Kegiatan** a. Pembinaan dalam penyusunan DDDTLH dan RPPLH kabupaten/kota. b. Mengevaluasi sejauhmana pemanfaatan dokumen DDDTLH kedokumen perencanaan lainnya. c. Melakukan sinergitas atas dokumen RPPLH provinsi dengan dokumen RPPLH kab/kota.

C. Sasaran Kegiatan

a. Tersedianya dan termanfaatkan dokumen perencanaan lingkungan hidup dalam penataan lingkungan.

b. Tersedianya acuan/pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan, rencana dalam pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

c. Tersedianya pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Pengguna Anggaran
Ir. SITI AISYAH, MSi
(Ka. Dinas LH Prov. Sumbar)

Kuasa Pengguna Anggaran
Yosmike Yusra, SE, M.Si
Ka. Bidang Tata Lingkungan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Desrizal, ST
Ka. Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor

Tim Pembinaan dan Evaluasi Tahun 2019

1. Ka. Dinas LH Prov. Sumbar
2. Ka. Bidang Tata Lingkungan
3. Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor
4. Staf Bidang Tata Lingkungan

C. URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
BELANJA LANGSUNG				**32.759.200**
BELANJA BARANG DAN JASA				**32.759.200**
Belanja Bahan Pakai Habis				**6.396.000**
Belanja alat tulis kantor				*1.896.000*
- Kertas folio 70 gr	4	rim	51.500	206.000
- Kertas kwarto 70 gr	4	rim	49.600	198.400
- Snelhecter Bufallo	11	buah	3.300	36.300
- Box file bahan plastik	8	buah	18.200	145.600
- Pena	23	buah	3.700	85.100
- Binder clip 155	10	buah	12.100	121.000
- Binder clip 260	10	buah	26.600	266.000
- Clip paper trigonai	4	kotak	30.200	120.800
- Toner laser jet Refill	2	buah	358.400	716.800
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi				*4.500.000*
- Bahan bakar minyak	1	ls	4.500.000	4.500.000
Beianja Cetak dan Penggandaan				**1.272.000**
Belanja Penggandaan				*1.272.000*
- Fotocopy	3.220	lembar	350	1.127.000
- Jilid buku laporan kegiatan	5	buah	29.000	145.000
Belanja Makanan & Minuman				**2.080.000**
Belanja makanan & minuman rapat				*2.080.000*
- Makan minum rapat (20 org x 2 kali)	40	ok	31.000	1.240.000
- Snack rapat (20 org x 2 kali)	40	ok	21.000	840.000
Belanja Perjalanan Dinas				***23.011.200***
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				*23.011.200*
Perjalanan dinas dalam daerah Dalam Rangka Pembinaan				*23.011.200*
Uang Harian:				9.760.000
- Eselon III/IV (1 org x 2 hari x 4 kali)	8	oh	500.000	4.000.000
- Staf Gol III/II (2 org x 2 hari x 4 kali)	16	oh	360.000	5.760.000
Penginapan:				5.600.000
- Eselon III / IV (1 org x 1 malam x 4 kali)	4	om	600.000	2.400.000
- Staf Gol III/II (2 org x 1 malam x 4 kali)	8	om	400.000	3.200.000
Sisa				451.200
Perjalanan Dinas ke Kab. Kep. Mentawai				7.200.000
Uang Harian:				4.200.000
- Eselon III/IV (1 org x 3 hari x 1 kali)	3	oh	750.000	2.250.000
- Staf Gol III/II (1 org x 3 hari x 1 kali)	3	oh	650.000	1.950.000
Penginapan:				2.000.000
- Eselon III / IV (1 org x 2 malam x 1 kali)	2	om	600.000	1.200.000
- Staf Gol III/II (1 org x 2 malam x 1 kali)	2	om	400.000	800.000
Transportasi (2 org)	2	ok	500.000	1.000.000

D. INDIKATOR KINERJA PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp. 32.759.200,-
Keluaran	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	7 kab/kota
Hasil	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	63%

E. TIME SCHEDULE KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan DPA, PO, SK dan kelengkapan administrasi lainnya).												
2. Rapat awal pelaksanaan kegiatan												
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi												
4. Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk rapat dan koordinasi ke KLHK terkait dengan pelaksanaan kegiatan												
5. Rapat koordinasi dengan kab/kota terkait hasil pelaksanaan kegiatan												
6. Penyusunan laporan akhir hasil kegiatan												

F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Kegiatan	TRIWULAN I						TRIWULAN II					
		Jan		Feb		Maret		April		Mei		Juni	
		Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	5	266.500	10	1.473.000	25	4.621.750	35	656.800	40	4.340.000	50	4.730.250

TRIWULAN III						TRIWULAN IV					
Juli		Agustus		Sept		Okt		Nov		Des	
Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65	4.578.000	70	4.450.600	80	4.582.950	90	2.112.800	95	500.000	100	426.750